

MODERNISASI DI TENGAH TRADISI KRATON: PASOEKAN POETERI J.P.O. (1934-1942)

Agung Suryo Setyantoro

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh

Email: goenktower81@gmail.com

Abstrak

Javaansche Padvinders Organisatie (J.P.O.), merupakan salah satu organisasi yang diprakarsai oleh Mangkunegara VII dan cukup menonjol yang bergerak dalam bidang kepanduan. Peranan wanita turut memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam induk organisasi J.P.O.. Walaupun pada awal pembentukannya J.P.O. hanya diikuti oleh laki-laki, akan tetapi dalam perkembangannya sekelompok wanita muncul didalamnya, dengan sebutan 'Pasoekan Poeteri J.P.O.'. Permasalahan yang menarik untuk diangkat dari organisasi kepanduan ini ialah bagaimana J.P.O. yang tumbuh dan berkembang di lingkungan maupun latar belakang budaya tradisional kraton yang masih sangat kental, mempersepsikan wanita dalam organisasi. Pendek kata Pasoekan Poeteri J.P.O telah merepresentasikan harapan dari Mangkunegara VII yaitu telah melakukan modernisasi dengan bertumpu pada akar kebudayaan Jawa. Pasoekan Poeteri J.P.O. sebagai wadah bagi anak-anak atau remaja perempuan di lingkungan Mangkunegaran telah mampu menjadi agen modernisasi khususnya bagi kaum perempuan itu sendiri maupun seluruh rakyat di Mangkunegaran.

Kata kunci: Modernisasi, perempuan, Pasoekan Poetri J.P.O., Mangkunegaran.

MODERNIZATION IN THE JAVANESE PALACE TRADITIONS: PASOEKAN POETERI J.P.O. (1934-1942)

Abstract

Javaansche Padvinders Organisatie(J.P.O.), was an organization initiated by Mangkunegara VII and known operating in the field of scouting. Women had an important role and gave contribution the such an organization. Although in the beginning, only men participated in JPO, later in its development, several women join the organization and established 'Pasoekan Poeteri J.P.O.'. One interesting topic to discuss from this movement organization is how J.P.O. which grew and developed in the environment or background of strong palace traditional cultures perceived the women within the organization. In brief, Pasoekan Poeteri J.P.O had actually represented the will of Mangkunegara VII, to keep up with modernization, yet continuously maintain the Javanese cultures. Pasoekan Poeteri J.P.O. as an accommodation for female children or teenagers in the Mangkunegaran environment had, in fact, been able to become the agent of modernization, especially for women themselves and all Mangkunegaran people.

Keywords: Modernization, women, Pasoekan Poetri J.P.O., Mangkunegaran.

I. PENDAHULUAN

Pada awal abad XX daerah Surakarta dan Yogyakarta menduduki suatu wilayah di Jawa Tengah yang oleh Belanda disebut *Vorstenlanden*, secara harafiah berarti “Tanah Raja-raja”, tetapi lebih pantas diterjemahkan sebagai “Daerah Kerajaan Jawa”. Salah satu wilayah di *Vorstenlanden*, yaitu wilayah Karesidenan Surakarta, dibagi menjadi dua wilayah yang hampir sama besarnya, satu bernama Kerajaan atau Kasunanan Surakarta, milik Susuhunan, dan satu lagi Mangkunegaran, wilayah Pangeran Mangkunegara (Larson, 1990: 1).

Dari dua kerajaan yang berada di wilayah Surakarta tersebut, Mangkunegaran merupakan sebuah kerajaan yang berpandangan maju, khususnya pada masa kerajaan dipegang oleh Mangkunegara VII. Mangkunegara VII merupakan seorang aristokrat Jawa yang progresif, ia juga memiliki watak keras, disiplin, penuh kasih sayang,¹ demokratis, dan berpikiran modern (Singgih, 1986: 14-15). Larson dalam bukunya menyebutkan bahwa Mangkunegara VII adalah seorang tokoh *renaissance* modern yang pandai menulis dan mengambil tindakannya, seorang penguasa yang terkenal karena memajukan kesenian dan karena upayanya untuk membantu kebangkitan kembali bahasa dan kebudayaan Jawa. Mangkunegara VII pun seorang nasionalis Jawa yang sejati walaupun dalam pergaulannya banyak berteman dengan orang-orang Belanda (Larson, 1990: 98-99). Bahkan Mangkunegara VII merupakan raja yang paling modern dan paling aktif, di antara empat raja yang ada di *Vorstenlanden* (Larson, 1990: 103).

Salah satu usaha Mangkunegara VII dalam memajukan rakyatnya antara lain dengan jalan memberikan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat Mangkunegaran. Hal ini tidak terlepas dari peranan Mangkunegara VII yang pada masa itu sudah aktif dalam berbagai organisasi kebangsaan, seperti menjadi ketua umum Budi Utomo, komisaris kantor percetakan Budi Utomo, anggota dewan redaksi surat kabar harian Darmo Kondo, anggota pengurus partai, dan juga sebagai pelindung beberapa organisasi (Larson, 1990: 103-104). dalam babad *Prangwadono (MN VII)*, karangan Citro Santono, khususnya dalam *tembang kinanti* terdapat satu bait yang berbunyi *...kudu mandang kapinteran/kang bisa dadi wong luwih...*, kalimat tersebut mempunyai arti bahwa “hanya seseorang yang mempunyai kepintaranlah yang akan menjadi orang bermartabat tinggi”. Sekilas dari babad tersebut di atas dapat ditarik makna bahwa Mangkunegara VII akan membawa rakyat Mangkunegaran selangkah lebih maju dengan memberikan pendidikan kepada rakyatnya.

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu media alternatif yang digunakan oleh Mangkunegara VII untuk memajukan rakyatnya dalam bidang pendidikan. Salah satu organisasi yang diprakarsai oleh Mangkunegara VII pada tahun 1917 dan cukup menonjol pada masa itu adalah *Javaansche Padvinders Organisatie* (J.P.O.), yang bergerak dalam masalah kependuan.

1 Hal ini terlihat ketika Mangkunegara memarahi anaknya, Partini, ketika melakukan kesalahan dalam belajar, lihat Roswitha Pamoentjak Singgih, *Partini, Tulisan Kehidupan Seorang Putri Mangkunegaran* (Jakarta: PT. Djambatan, 1986), hlm. 14-15.

Peta historiografis yang menggambarkan J.P.O. dan kondisi sosial politik Mangkunegaran pada masa itu dapat dilihat melalui beberapa karya, seperti tulisan berjudul *Javaansche Padvinders Organisatie: Awal Munculnya Kepanduan Indonesia, 1916-1942* yang membahas mengenai J.P.O. secara umum dan terdiri dari bagian yang menceritakan dari berdirinya hingga aktivitas yang dilakukannya. Pandu putri yang menjadi bagian dari J.P.O. hanya diulas secara sekilas (Suharini, 2000).

Satu tulisan yang berjudul *Sejarah Perkembangan dan Peranan Organisasi Pandu Jawa di Mangkunegaran 1916-1942* menjelaskan peranan Pandu Jawa dari awal hingga kedatangan Jepang ke wilayah Mangkunegaran. Walaupun informasi mengenai Pasoekan Poeteri J.P.O. masih minim namun tulisan mampu memberi gambaran singkat J.P.O. yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya (Darwati, 1994).

Karya lain yang masih relevan untuk melihat kondisi sosial masyarakat Mangkunegaran ialah *Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran, 1900-1945*. Tulisan ini membahas kebijakan politik etis yang dijalankan di wilayah Mangkunegaran serta peranan Mangkunegara VII dalam memajukan pendidikan di wilayahnya (Wasino, 1995/1996).

Dibandingkan dengan referensi-referensi yang menjadi acuan di atas, penelitian ini mencoba melihat posisi kaum perempuan yang dipresentasikan melalui kelompok wanita dalam organisasi kependuan J.P.O. yang berada di lingkungan kraton, yang dianggap sebagai tempat yang sangat konservatif dalam menempatkan posisi perempuan.

Seperti halnya dengan organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan pada umumnya, peranan wanita turut memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam induk organisasinya. Walaupun pada awal pembentukannya J.P.O. diperuntukkan bagi anak laki-laki, akan tetapi dalam perkembangannya sekelompok wanita muncul di dalamnya, dengan sebutan Pasoekan Poeteri J.P.O.. Dalam organisasi kependuan J.P.O. ini kelompok wanita atau Pasoekan Poeteri J.P.O. muncul hampir delapan belas tahun setelah organisasi tersebut terbentuk atau tepatnya pada tahun 1934.

Dalam lingkungan kraton, J.P.O. sebagai kependuan nasional pertama, sangat menarik untuk dikaji, khususnya Pasoekan Poeteri J.P.O.. Hal ini menarik, karena kelompok ini bisa dikatakan sebagai organisasi modern dengan segala tata cara yang rasional dan berbau Barat, tumbuh di lingkungan yang masih memegang erat tradisi “feodal” dengan segala aturan-aturan yang mengikat dalam hubungan sosial dan kulturalnya yang rumit.

Permasalahan yang menarik untuk diangkat dari organisasi kependuan ini ialah bagaimana J.P.O. yang tumbuh dan berkembang di lingkungan maupun latar belakang budaya tradisional kraton yang masih sangat kental, mempersepsikan wanita dalam organisasi. Sejauh manakah pengaruh modernisasi yang ditimbulkannya di lingkungan Mangkunegaran, terutama bagi kaum perempuan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan secara kronologis perkembangan Pasoekan Poetri J.P.O. dan sejauh mana J.P.O. – yang tumbuh dan berkembang di lingkungan maupun latar belakang budaya tradisional kraton yang masih sangat kental – mempersepsikan perempuan dalam organisasinya, yang tergabung dalam Pasoekan Poeteri.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh modernisasi yang telah dirintis oleh Pasoekan Poeteri J.P.O. dalam masyarakat.

Dalam penelitian sejarah, hal yang pokok adalah bukti-bukti, berkas-berkas, atau kesaksian-kesaksian. Agar mampu menggali sumber sebanyak-banyaknya diperlukan ketelitian dan kesabaran agar diperoleh bahan yang relevan dengan bidang kajian. Pengumpulan data-data atau sumber dilakukan melalui penelusuran sumber tertulis, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang terdiri dari arsip tentang organisasi kependuan J.P.O. dan Mangkunegara VII, serta dokumen-dokumen maupun majalah yang pernah terbit pada masa itu di Pura Mangkunegaran, seperti Majalah *Kepandoean* yang diterbitkan organisasi J.P.O. maupun *babad* yang ditulis pada masa itu. Penelusuran sumber-sumber primer dalam bentuk arsip-arsip, surat-surat berharga ataupun dokumen lainnya dilakukan melalui studi kearsipan di Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran

II. PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Mangkunegaran dan Mangkunegara VII

Mangkunegaran merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang terletak di Karesidenan Surakarta. Sebagai bagian dari wilayah *vorstenlanden*, Mangkunegaran terletak di bagian timur. Wilayah Mangkunegaran ini meliputi lereng barat dan selatan Gunung Lawu, meluas sampai daerah hulu Sungai Bengawan Solo, menuju Gunung kidul. Di bagian selatan wilayah Mangkunegaran mencapai bagian timur dari Gunung Sewu sampai ke Samudera Hindia. Di sebelah barat laut dari dataran rendah Bengawan Solo hingga ujung-ujung kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dengan wilayah Kasunanan Surakarta, Kota Mangkunegaran hanya dibatasi dengan jalan raya Slamet Riyadi sekarang atau jalan kereta api pada masa itu. Mangkunegaran terletak di sebelah utara jalan kereta api dan Kasunanan Surakarta terletak di selatannya.

Ibukota Mangkunegaran tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan Kasunanan Surakarta. Ibukota Mangkunegaran hanya seperlima dari Kota Surakarta, sedangkan empat perlimanya merupakan ibukota Kasunanan Surakarta (Soeratman, 1989: 2). Pada awal abad XX daerah Kasunanan Surakarta dibagi menjadi 23 *distrik* dan 101 *onderdistrik*, sedangkan Mangkunegaran hanya dibagi menjadi 7 *distrik* dan 32 *onderdistrik* serta 750 kelurahan.

Sensus penduduk pada tahun 1930 mencatat jumlah penduduk Mangkunegaran secara keseluruhan berjumlah 908.318 jiwa dan tersebar dalam wilayah-wilayah Mangkunegaran. Wilayah Wonogiri berpenduduk 576.370 jiwa, wilayah kabupaten Kota Mangkunegaran berjumlah 321.448 jiwa, dan di daerah *enclave* Ngawen berpenduduk 10.500 jiwa. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak berada di wilayah Wonogiri (Faisal N, 2004: 12-13).

Pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 terdapat satu fenomena baru yang belum pernah ada sebelumnya yaitu diperkenalkannya sistem pendidikan Barat. Dengan diperkenalkannya sistem pendidikan itu, pengaruh Barat semakin mendalam dalam alam

pikiran masyarakat Jawa, khususnya dan Hindia Belanda pada umumnya, karena pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu kemajuan (Wasino, 1994: 6). Perkembangan pendidikan yang terjadi telah menciptakan golongan masyarakat terdidik yang mulai memikirkan kemajuan yang terdapat di lingkungannya.

Di antara semua istana kerajaan yang terkena dampak dari fenomena tersebut di atas, Mangkunegaranlah yang paling berhasil menyesuaikan diri dengan keadaan baru pada masa kekuasaan Belanda. Mungkin penting untuk dicatat bahwa di Mangkunegaran tradisi-tradisi militer bangsawan Jawa tetap hidup, sekalipun di bawah kekuasaan Belanda. Legiun Mangkunegaran, yang terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, tetap dipertahankan dengan dukungan keuangan Belanda (Ricklefs, 1991: 194). Kemungkinan besar hal inilah yang mendasari Mangkunegara VII membentuk Organisasi Kepanduan J.P.O. untuk melatih dan melahirkan calon-calon pemimpin, tentara, dan para pegawai Mangkunegaran (Pringgodigdo, 1960: 36).

Sejak dimulainya modernisasi di lingkungan kerajaan-kerajaan Jawa termasuk juga di Mangkunegaran yang dicetuskan oleh Mangkunegara IV hingga puncaknya pada masa pemerintahan Mangkunegara VII, Kerajaan Mangkunegaran inilah yang paling berhasil menyesuaikan dengan keadaan baru pada masa kolonial. Usaha yang dijalankan Mangkunegara VII ini mampu membawa Kerajaan Mangkunegaran sebagai kerajaan kecil yang memiliki tradisi yang lain dari kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan ada seorang ahli kebudayaan Jawa yang hidup pada masa pemerintahan Mangkunegara VI dan VII menyatakan bahwa Mangkunegaran merupakan kerajaan yang memiliki sifatnya yang khas Jawa, dalam arti menjunjung tinggi apa yang hidup dalam hati rakyat Jawa, dan menunjukkan jalan bagaimana dapat hidup bersama dengan kemajuan dunia tanpa kehilangan pribadi yang telah dimilikinya (Wasino, 1994: 10). Bahkan Mangkunegara VII disebutkan sebagai perpaduan antara Timur dan Barat, karena telah banyak kegiatan yang dilakukannya untuk mengembangkan kebudayaan Jawa dengan sentuhan-sentuhan budaya modern, salah satunya dengan mendirikan organisasi kepanduan J.P.O., baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Mengenai keadaan perempuan Indonesia pada abad XIX sampai awal abad XX masih ada dalam konservatisme dan sangat terikat oleh adat. Pengajaran di sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan hanya mendapat pendidikan di rumah atau di lingkungan keluarga dan pendidikan yang diperolehnya tidak lebih dari persiapan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Memasak, menjahit, dan membatik merupakan sebagian besar kegiatan anak-anak perempuan. Ikatan adat sangat kuat yang tidak memungkinkan mereka lepas dari kungkungan adat dan keluarga, dan kalau dibandingkan dengan anak laki-laki, mereka jauh ketinggalan (Suhartono, 1994: 27).

Melihat kenyataan tersebut, Mangkunegara VII secara moral tidak bisa membiarkan keadaan yang membelenggu rakyatnya terjadi terus menerus. Kemajuan yang telah dirintis pendahulu Mangkunegara VII tidak ingin dibiarkan begitu saja tanpa adanya peningkatan

baginya dan rakyat yang ia pimpin.² Mangkunegara VII juga menyadari bahwa pada masa itu kepandaianlah yang akan membawa rakyat dan prajanya mempunyai martabat yang tinggi. Sekolah-sekolah khusus putri pun didirikan dan juga membolehkan bahkan mendukung setiap bentuk kegiatan anak-anak gadis di wilayah Mangkunegaran untuk beraktivitas bersama-sama dengan anak lelaki lainnya, salah satunya dalam kegiatan kepanduan yang didirikannya.

Salah satu usaha Mangkunegara VII dalam memajukan rakyatnya antara lain dengan jalan memberikan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat Mangkunegaran. Hal ini tidak terlepas dari peranan Mangkunegara VII yang pada masa itu sudah aktif dalam berbagai organisasi kebangsaan, seperti menjadi Ketua Umum Budi Utomo, Komisaris Kantor Percetakan Budi Utomo, anggota dewan redaksi dari surat kabar harian partai, Darmo Kondo, anggota pengurus partai, dan juga sebagai pelindung beberapa organisasi (Larson, 1990: 103-104). Dalam Babad *Prangwadono (MN VII)*, karangan Citro Santono, khususnya dalam *Tembang Kinanti* terdapat satu bait yang berbunyi *...kudu mandang kapinteran/kang bisa dadi wong luwih...*, kalimat tersebut mempunyai arti bahwa “hanya seseorang yang mempunyai kepintaranlah yang akan menjadi orang bermartabat tinggi”. Sekilas dari babad tersebut diatas dapat ditarik makna bahwa Mangkunegara VII akan membawa rakyat Mangkunegaran selangkah lebih maju dengan memberikan pendidikan kepada rakyatnya. Dapat dikatakan juga proses modernisasi Mangkunegaran ini juga dilakukan melalui pendidikan yang diberikan tersebut.

Mangkunegara VII pun membangun segala sarana dan parasarana pendidikan dan juga mendirikan beberapa sekolah dasar seperti *Kopshool*, *Siswarini*, *HIS*, dan sekolah lanjutan *MULO*, serta sekolah untuk mendidik para putri menjadi ibu rumah tangga yang baik, yakni *Huishoud School*. Selain membentuk sekolah-sekolah yang sifatnya formal, perkumpulan-perkumpulan pemuda juga ikut diperhatikan oleh Mangkunegara VII. Setahun setelah penobatan Soerjo Soeparto menjadi Mangkunegara VII, yaitu pada tahun 1917, ia mendirikan perkumpulan kepanduan yang diberi nama *Javaansche Padvinders Organisatie (J.P.O.)*. Perkumpulan kepanduan ini segera berkembang di mana-mana, baik di kawedanan, kepenéwon, ataupun di desa-desa (Tjitrosomo, 1944: 3).

B. J.P.O. : Induk Pasoekan Poetri

Gerakan kepanduan yang muncul di Indonesia pada masa kolonial, dimulai dengan adanya cabang *Nederlandse Padvinders Organisatie (N.P.O.)* pada tahun 1912 yang semula hanya untuk golongan Eropa saja dan bersifat eksklusif, kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi “*Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging*”. Kepanduan yang muncul dan diprakarsai oleh bangsa Indonesia sendiri adalah “*Javaansche Padvinders Organisatie*” (J.P.O.) yang berdiri pada bulan September 1917 atas prakarsa

² Pendahulu Mangkunegara VII, seperti Pangeran Sambernyowo sangat menghargai peranan wanita, hal ini dibuktikan dengan adanya seorang *carik* wanita yang dipercaya dalam menyusun catatan harian sejarah perkembangan praja (*daag-boek*). Selain itu, dalam mengawal keselamatan Praja Mangkunegaran dibentuk dan disiagakan beberapa regu prajurit putri “*Landrang Mangungkung*”.

K.G.P.A.A Mangkoenagoro VII (Tjitrosomo, 1944; Pontjowolo, 1993; *Kepandoean*, No.1, (Januari 1936).³

Ide pendirian organisasi kependuan ini tercetus pada saat perayaan penobatan Soerjo Soeparto menjadi Raja Mangkunegaran. Perayaan itu menampilkan murid-murid sekolah yang membuat peralatan-peralatan, baris-berbaris, latihan olah raga bebas, latihan ketertiban dan juga senam. Hal ini yang membuat orang-orang sadar bahwa anak-anak itu tidaklah cukup hanya mendapatkan kepintaran saja, namun juga perlu dididik tentang kesehatan badannya dan kehalusan budi pekertinya. Oleh karena itu timbullah pikiran, bahwa di luar sekolah sudah sepantasnya anak-anak mendapat didikan secara *padvinder* atau kependuan (Josowidagdo, 1939: 163).

Organisasi kependuan ini beranggotakan masyarakat Mangkunegaran yang meliputi priyayi dan rakyat biasa. Dengan lahirnya J.P.O. dapat dikatakan sebagai penanda awal munculnya kebangkitan kependuan bumiputra di Indonesia. Kemudian setelah itu mulai bermunculan berbagai organisasi kependuan yang lain, seperti *Padvinder Muhammadiyah*, *Nationale Padvinderij*, *Syarikat Islam Afdeling Padvinderij* (SIAP), *Nationale Islamietische Padvinderij* (NATIPIJ) dan *Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie* (INPO). Dari sekian banyak perkumpulan kependuan yang ada di Hindia Belanda dapat digolongkan menjadi tiga golongan menurut asasnya yaitu: keagamaan, kebangsaan, dan yang bekerja sama dengan kependuan Belanda. Meskipun semua organisasi kependuan, kecuali NIPV, dipaksa berkembang di luar kerangka kependuan internasional dan oleh pemerintah kolonial bahkan dicegah supaya jangan bertemu dengan Baden Powell ketika ia mengunjungi Hindia Belanda pada tahun 1934, namun mereka tetap mempertahankan semangat kuat kependuan. Penekanannya adalah pada pembentukan watak dan pertumbuhan kehormatan diri pribadi, tetapi perhatian yang cukup besar juga diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang mendorong pandangan yang luas dan bahkan bersifat internasional (Frederick, 1989: 89).

Berdirinya J.P.O. juga tak lepas dari masalah politik yang sedang berkembang pada saat itu di Mangkunegaran, seperti campur tangan yang besar oleh Belanda, serta adanya konflik dengan Paku Buwono X. Hal ini dilakukan Mangkunegara VII di satu sisi untuk memajukan rakyatnya dan di sisi lain untuk menegaskan bahwa Mangkunegaran adalah kerajaan yang “merdeka”, lepas dari pengaruh manapun termasuk Kasunanan sebagai rival politiknya sejak Mangkunegaran berdiri.

J.P.O. sebagai organisasi kependuan pribumi milik Kerajaan Mangkunegaran dan bercorak Jawa, maka J.P.O. diorganisir menurut prinsip-prinsipnya atau sistemnya sendiri. Dalam hal ini J.P.O. merupakan organisasi formal yang memadukan unsur-unsur Barat yang modern dengan unsur-unsur tradisional Jawa tertentu dan unsur-unsur kependuan dengan non-kependuan. Kependuan J.P.O. secara struktural juga memiliki hierarki yang jelas. Sebagai pucuk tertinggi kepengurusan dipegang oleh Mangkunegara VII sebagai *Beschermheer*

³ Mengenai tahun berdirinya J.P.O. ada buku yang menulis bahwa J.P.O. berdiri tahun 1916, lihat dan bandingkan A.K. Pringgodigdo, *Ibid*, hlm. 36.; George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990) hlm. 104.; dan Theresia Sri Suharni, “Javaansche Padvinders Organisatie : Awal Munculnya Kependuan Indonesia, 1916-1942”. *Skripsi S-1*, Fakultas Sastra, UGM, 2000, hlm. 18.

(pelindung) sampai dengan *Afdeling Bestuur* (Pengurus Cabang) (*Kepandoean*, No. 2, Februari 1936).

Perkembangan J.P.O. dari tahun ke tahun mulai menampakkan kemajuannya. Banyak masyarakat, tak terkecuali, priyayi-priyayi *Panewu Pangreh Praja* maupun rakyat biasa bertanya mengenai berbagai syarat dan aturan-aturan pembentukan cabang J.P.O. untuk kemudian dikembangkan di wilayahnya masing-masing, seperti permintaan dari *Pakempalan Adjengipoen Kawoela Onder-district Ngoentoronadi* (P.A.K.O.N.) yang menginginkan adanya cabang J.P.O. di wilayah Nguntoronadi (Surat kepada H.B J.P.O, 1935). *Hoofdbestuur* J.P.O. kemudian menyebarkan surat edaran yang berisikan syarat pembentukan cabang J.P.O., antara lain: (1) harus sudah ada anak-anak sedikitnya 25 orang yang bersedia menjadi pandu, (2) membuat kepengurusan, terutama harus ada *Voorzitter*, *Secretaris*, *Penningmeester*, dan 2 *Commissaris*, (3) setelah kepengurusan terbentuk, kemudian kegiatan kepanduan dapat dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam seminggu, (4) jika kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik, memberikan laporan kepada *Hoofdbestuur* J.P.O. di Mangkunegaran untuk mendapatkan berbagai perlengkapan maupun sarana yang dibutuhkan.

Prestasi yang paling membanggakan yang pernah diraih J.P.O. yaitu ketika pada tahun 1937 organisasi ini mengirimkan wakilnya dalam *wereld jambore* yang dilaksanakan selama 10 hari di negeri Belanda dan mengibarkan bendera *Pare Anom* diantara 42 bendera negara lain yang mengikuti ajang jambore tersebut (Sunarmi. 2004: 64-65). Hal ini membuktikan bahwa pandu-pandu dari Mangkunegaran mampu bersaing dan tak kalah dengan 30.000 anak-anak Eropa dan belahan dunia lainnya yang telah berpendidikan maju dalam kegiatan jambore tersebut.

Perkembangan J.P.O. selama hampir dua dasa warsa pertama dapat dikatakan tidak mengalami kemajuan maupun kemunduran. Jumlah pandu pada akhir tahun 1933 ada 516 orang, selama tahun 1934 hanya bertambah 135 orang. Hal ini bisa dipahami karena selain ada kenaikan di suatu cabang, tetapi di cabang yang lain juga ada penurunan jumlah anggotanya. Dilaporkan juga di cabang Wonogiri dulu pernah ada pandu perempuan (*padvindsters*) namun karena kurangnya perhatian dan juga ketiadaan pemimpin untuk anak-anak perempuan itu maka pada tahun 1934 sudah tidak terdengar lagi kegiatannya (Jaarverslag J.P.O. tahun 1934).

C. Pasoekan Poetri J.P.O.

Pada awal berdirinya organisasi kepanduan J.P.O., tidak ada sama sekali pikiran untuk menjadikan J.P.O. sebagai organisasi yang “utuh” dengan anggota laki-laki dan perempuan di dalamnya. Hal ini terjadi karena pada saat itu posisi perempuan belumlah cukup kuat bila dibandingkan laki-laki, terlebih untuk anak-anak. Dikotomi antara pekerjaan yang pantas untuk laki-laki dan perempuan masih terjadi, walaupun sifatnya tidak terlalu keras.⁴

4 Wawancara Bari/Dalinem, 6 April 2006 di Mangkunegaran, Surakarta.

Berita mengenai adanya pandu perempuan di Wonogiri akhirnya sampai juga di lingkungan keraton. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan perempuan di istana, khususnya dari lingkungan Sekolah Siswo Rini. Setelah hampir tujuh belas tahun J.P.O. berdiri, mengapa anak-anak perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan organisasi tersebut. Menurut mereka kegiatan J.P.O. mengajarkan cara hidup yang baik dalam hal jasmani maupun rohani.

Melihat antusiasme yang cukup besar dari lingkungan keraton maka para pembesar organisasi J.P.O. mulai memikirkan permasalahan tersebut dengan hati-hati, mengingat pada masa itu belum sepenuhnya perempuan bisa dengan seenaknya untuk berkegiatan layaknya laki-laki.

Setelah dipikir secara matang dan kebetulan ada seorang remaja putri, bernama Trini, yang sanggup untuk memimpin dan membantu mendirikan Paoekan Poetri di dalam J.P.O., pada bulan Maret 1934 atas izin dan dorongan dari Mangkunegara VII berdirilah Paoekan Poetri (*Meisjes troep*) J.P.O. cabang Solo. Struktur kepengurusan Paoekan Poetri tersebut tetap di bawah pengurus besar J.P.O. yang berkedudukan di Solo (Trini, 1936: 8-9).

Setelah resmi adanya kelompok pandu perempuan di dalam organisasi kepanduan J.P.O., langkah awal kelompok ini tidak semulus seperti pada saat pendirian organisasi induknya dahulu. *Hoofdbestuur* J.P.O. sebagai pengurus tertinggi mendapat serangan dari berbagai pihak dengan adanya kelompok perempuan di tubuh J.P.O.. Kelompok yang tidak setuju dengan adanya pandu perempuan tersebut berpendapat bahwa anak-anak perempuan tidak pantas untuk melakukan kegiatan seperti apa yang dilakukan anak-anak lelaki. Mengetahui adanya pihak-pihak yang kurang setuju tersebut, *Hoofdbestuur* J.P.O. yang dibantu kepala sekolah Mangkunegaran kemudian membuat propaganda-propaganda dan menerangkan kepada semua pihak yang belum mengetahui maksud yang sebenarnya dari adanya kegiatan pandu bagi anak-anak perempuan di wilayah Mangkunegaran (Jaarverslag J.P.O. tahun 1934).

Mangkunegara VII sebagai *Beschermheer* J.P.O. juga tak membiarkan perbedaan pandangan mengenai pandu perempuan berkepanjangan, dengan memberikan pengertian dan nasehat-nasehat bagaimana cara-cara yang terbaik dalam memimpin anak-anak perempuan sesuai dengan ajaran-ajaran kepanduan tanpa harus meninggalkan adat kebudayaan Jawa. Selain itu juga dengan mulai datangnya pemimpin perempuan (*leidster*) mampu membawa kemajuan bagi kelompok pandu perempuan itu, dimana pada awalnya pandu perempuan hanya berjumlah 8 orang dapat berkembang menjadi 52 orang sampai akhir tahun 1934 (Jaarverslag J.P.O. tahun 1934).

Belum begitu lama pendirian Paoekan Poetri J.P.O., tibalah perayaan besar *setoedjoe hari tahoen* (?) Mangkunegara VII. Pada perayaan itulah untuk pertama kali J.P.O. secara umum bersama Paoekan Poetri, turut ambil bagian dalam perayaan tersebut di lapangan Manahan. Pada hari itu juga Paoekan Poetri untuk pertama kali keluar dan membentuk defile di hadapan Raja Mangkunegara VII yang juga sebagai pelindung dari organisasi J.P.O. dan permaisuri Goesti Kandjeng Ratu Timoer. Mangkunegara VII yang melihat penampilan

kepanduan J.P.O. yang terlihat lain dari biasanya semakin bangga dengan kemunculan kaum perempuan di prajanya. Mulai hari itu, jumlah anak-anak putri semakin bertambah banyak yang menjadi *Padvindsters* dan *Kabouters*, yang semula hanya berjumlah 25, kemudian menjadi 60 (*Kepandoean*, No.1, Januari 1936).

Pasoekan Poeteri J.P.O., seperti juga halnya pandu J.P.O. bagian putera, memiliki berbagai peraturan-peraturan yang mengikat dan bersifat formal dari pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap organisasi J.P.O., dalam hal ini adalah Hoofdbestuur J.P.O. yang berlaku untuk seluruh anggotanya. Hal inilah yang menjadikan J.P.O. sebagai sebuah organisasi yang sifatnya modern. Peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari aturan-aturan baku kepanduan yang sifatnya internasional namun di dalamnya juga tidak sepenuhnya meninggalkan adat Jawa.

Satu kelompok yang lengkap dari pandu bagian putri terdiri dari satu *kabouterkring*, satu *padvindstertroep*, dan satu *pieonersterstam*. Dalam setiap golongan tersebut terdapat pemimpin-pemimpinnya, sehingga semua kegiatan yang dilakukan pandu putri tersebut ada yang memantaunya (*Organisatie J.P.O. Schematisch*, 1938).

Bagian yang pertama yaitu *kabouters* (pandu kurcaci), anggota dari golongan ini adalah anak-anak gadis yang berumur delapan sampai sebelas tahun. Bagi *kabouters* golongan yang terbesar dinamakan *kabouter-kring* (kalangan pandu kurcaci) yang terbagi dalam 4 *volkjes*. Satu *kabouter-volkje* terdiri dari 6 *kabouters*, sehingga dalam satu *kabouter-kring* terdiri dari 24 *kabouters*. Dalam satu *kabouter-kring* terdapat pemimpin yang disebut *Bruine uil*, dengan dibantu oleh seorang penolong yang disebut *gele uil*. *bruine uil* dalam setiap kesempatan dipanggil dengan “oehoe”, sedangkan *gele uil* dipanggil dengan “oehi”. Sedangkan yang mengepalai *kabouter-kring* dinamakan *hoofdkabouter*. Ajaran yang pertama untuk *kabouters* adalah memberi salam kepada teman-temannya seandainya bertemu. Salam itu dilakukan dengan mengangkat dua jari kanan yang ditempelkan di bagian dahi. Dua jari tersebut berarti mengingatkan kepada *kabouters* atas janjinya sebagai seorang pandu, yaitu “Dengan sungguh-sungguh saya berjanji: (1) Menjadi *kabouter* yang sejati; (2) Menolong siapapun juga sedapat saya, khususnya di rumah” (Trini, 1936: 9).

Bagian yang kedua yaitu *padvindster* (pandu putri), yang beranggotakan anak-anak gadis putri berumur sebelas sampai delapan belas tahun. Sama halnya dengan *kabouters*, bagi *padvindsters* golongan yang terbesar dinamakan *padvindstertroep* (pasukan pandu putri) yang terbagi lagi menjadi 4 *ploegen*. Satu *padvindsterploeg* terdiri dari 6 *padvindster*, sehingga dalam satu *padvindstertroep* terdiri dari 24 *padvindster*. Sekumpulan *padvindster* ini dipimpin oleh *padvindster-leidster*.

Bagian ketiga yaitu *pieonerster* (pandu perintis) yang beranggotakan remaja putri berusia lebih dari delapan belas tahun. Sekumpulan dari *pieonerster* disebut *pieonersterploeg* (regu pandu perintis), dan beberapa *pieonersterploeg* ini dikelompokkan lagi menjadi *pieonersterstam* (suku pandu perintis).

Dalam aktivitas rutinnnya agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terarah pada tumbuhnya rasa percaya diri, tanggung jawab dan disiplin, maka sebagai penanggung jawab

kegiatan diangkatlah seorang *groep leidster* yang bertugas mengepalai, memimpin, dan membina satu kelompok pandu putri. Kemudian untuk lingkup yang lebih kecil lagi diangkat pula seorang *leidster* yang bertugas mengepalai, memimpin, dan membina satu bagian pandu putri.

Untuk menjadi anggota pandu, tidak semua anak-anak diterima begitu saja. Sebelum masuk menjadi anggota, setiap anak diwajibkan untuk berjanji dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi di samping syarat umur yang harus dipenuhi.

Peraturan yang terdapat dalam organisasi tersebut salah satunya menyangkut pengelompokan kelas-kelas atau tingkatan-tingkatan bagi anggotanya berdasarkan umur anggotanya, seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu juga setiap golongan pandu yang telah dibedakan menurut umur tersebut dibagi lagi menjadi tiga kelas (kelas 3, kelas 2, dan kelas 1). Agar dapat naik ke kelas yang lebih tinggi setiap pandu harus lulus syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti umur telah cukup untuk masuk ke kelas-kelas tertentu, dinilai patuh dan hormat kepada para pemimpinnya, dan harus lulus ujian semua pelajaran dan pendidikan kepanduan yang sudah diberikan .

Sebagai organisasi yang bersifat modern dan formal J.P.O. memiliki seperangkat undang-undang (*Padvindeswetten J.P.O.*). Undang-undang ini berarti kesetiaan atau perjanjian yang digunakan sebagai petunjuk mengenai kepanduan untuk menuntun semua pandu. Sehingga dengan adanya penuntun tersebut akan menjadikan pandu-pandu memiliki watak seperti yang telah dituliskan dengan rinci dalam undang-undang yang dilaksanakan dengan program-program yang telah terencana. Oleh karena itu, undang-undang yang berlaku tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dan pengurusnya. Pada dasarnya isi undang-undang pandu J.P.O. juga selaras dengan isi undang-undang pandu yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia sebagai mana telah digariskan oleh Baden Powel (Darwati, 1994: 42).

Undang-Undang J.P.O. yang juga berlaku bagi Pasoekan Poeteri tersebut terdiri dari 13 butir, antara lain:

1. Pandu selamanya jujur, dapat dipercaya dan tidak mengecewakan.
2. Pandu adalah pembela bagi segala yang lemah dan teraniaya.
3. Pandu selalu siap berkorban, sederhana, dan bersahaja hidupnya.
4. Pandu selalu menghargai orang dan pendapat orang.
5. Pandu selamanya menurut pada perintah pimpinan.
6. Pandu selamanya tertib, rapi, dan beraturan.
7. Pandu harus melindungi seluruh isi alam.
8. Pandu itu cinta kepada tanah air.
9. Pandu itu selamanya suci pikiran, perkataan, dan tindakan.
10. Pandu percaya kepada diri sendiri, dan dapat menahan hawa nafsu.

11. Pandu itu berwatak ksatria.
12. Pandu itu selalu siap dan cepat mengambil keputusan dan kuat kemauannya.
13. Pandu selamanya cinta bekerja (*Padvinderswetten* J.P.O).

Pasoekan Poeteri J.P.O. dalam perjalanan dan perkembangannya dapat dilihat melalui tiga periode perkembangan yang dilaluinya. Sejak terbentuk pada tahun 1934 hingga tahun-tahun pertama dapat dikatakan sebagai periode pertama perkembangannya.

Periode kedua perjalanan Pasoekan Poeteri dimulai akhir tahun 1935 hingga tahun 1939 di mana pada tahun-tahun tersebut perkembangan jumlah anggotanya meningkat dan terjadi juga peningkatan kualitas karena adanya campur tangan dari kepanduan Belanda N.I.P.V..

Periode ketiga Pasoekan Poeteri dimulai dari tahun 1940an, yaitu sejak terjadinya penurunan jumlah anggota yang cukup besar, hingga masa-masa akhir organisasi ini, yaitu pada tahun 1942, yang ditandai dengan kedatangan Bangsa Jepang dan pembubaran berbagai organisasi termasuk J.P.O oleh Pemerintah Jepang.

D. Modernisasi Pasoekan Poetri J.P.O.

Berbicara mengenai modern maupun modernisasi mungkin tak akan berhenti pada satu titik. Namun dalam konteks yang berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Jawa pada awal abad XX dalam penelitian ini, konsep modern ataupun modernisasi tak akan dibahas hingga detail dan rumit.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa modernisasi adalah proses, cara atau perbuatan, pergeseran atau peralihan sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk menyesuaikan hidup dengan tuntutan hidup masa kini (Salim dan Salim, 1991).

Modernisasi mencakup proses yang sangat luas yang kadang-kadang tak dapat ditetapkan batas-batasnya secara mutlak. Di suatu daerah satu dengan daerah yang lain bentuk-bentuk modernisasi tidak bisa dipersamakan (Soekanto, 1988: 330). Oleh karena itu, setiap contoh kasus modernisasi, dapat dinamakan kebudayaan yang didambakan. Dalam arti kata inilah, maka Hellenisme dan Sinicisasi merupakan bentuk purba dari “modernisasi, sedangkan “Westernisasi” merupakan jenis modernisasi yang lazim ditemukan pada abad XX (Riggs, 1980: 28).

Berdasarkan arti kata di atas, penggunaan cara-cara budaya Barat ataupun pemasukan barang-barang materi Barat, pada awal abad XX merupakan modernisasi. Dengan sendirinya hingga tahap tertentu modernisasi hanya sedikit atau sama sekali tidak menuntut perubahan dalam susunan sosio-politik serta ciri-ciri kepribadian bangsa yang melaksanakan modernisasi itu. Akan tetapi, banyak pembaharuan yang dimasukkan ke dalam proses modernisasi secara mendalam mempengaruhi gaya hidup tradisional. Dalam implikasi yang lebih dalam, modernisasi sering secara diam-diam melemahkan atau bahkan sampai menghancurkan cara kehidupan tradisional dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Itu pulalah yang menjadi sebab

timbulnya perlawanan kuat dari pihak kalangan yang paling diuntungkan oleh cara dan gaya hidup lama (Riggs, 1980: 28-29).

Hakekat dari perubahan dalam suatu masyarakat adalah pergeseran dalam cara menyampaikan ide dan sikap, karena apa yang dilakukan modernisasi adalah menyebarkan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang cara hidup baru (Lerner, 1978: 29). Modernisasi dalam konteks penelitian ini bisa dipersepsikan sebagai perubahan dari suatu masyarakat tradisional atau pra-modern menuju tipe masyarakat dengan bentuk-bentuk “kemajuan” yang dapat dikaitkan dengan negara Barat.

Untuk melihat lebih jelas modernisasi kaum perempuan, lebih khusus lagi mengenai perkembangan perempuan Jawa berkaitan dengan adanya kelompok pandu putri, Pasoekan Poeteri J.P.O. di wilayah Mangkunegaran, dapat dilihat melalui perkembangan organisasi tersebut. Berdasarkan runtutan waktu, yaitu sebelum dan sesudah adanya Pasoekan Poeteri J.P.O., maka perubahan yang terjadi di dalamnya dapat lebih mudah dicerna.

1. Kehidupan Perempuan sebelum Pasoekan Poeteri J.P.O.

Pada masa-masa awal abad XX, tidak ada orang yang mengingkari bahwa budaya Jawa yang berasal dari zaman feodal sedang, harus, dan telah mengalami perubahan-perubahan, sebab sudah berabad-abad menerima pengaruh asing; sebagian pengaruh asing tersebut diserap menjadi miliknya, dicampur menjadi satu dengan yang diterima dari para leluhur dan sebagian lagi dipertahankan. Akan tetapi pengaruh dari Barat yang sedikit banyak telah menyebar tersebut bukan rakyat kebanyakan yang dapat menikmatinya, sebagai contohnya pendidikan bagi bumiputra bertujuan untuk mencetak pegawai-pegawai rendahan dalam pemerintahan Hindia Belanda dan itupun dalam jumlah yang terbatas dan berasal dari kalangan elit birokrasi Bumiputra.

Awal abad XX merupakan awal terjadinya perubahan masyarakat di Hindia Belanda. Perubahan kehidupan sosial budaya yang berjalan dari waktu ke waktu dapat terjadi karena faktor intern maupun ekstern. Faktor intern penyebab perubahan tersebut yaitu timbul karena telah zamannya hendak timbul, sedangkan faktor eksternnya adalah karena perikehidupan di sini takluk ke bawah kekuasaan segala kejadian di luar negeri, meskipun segala yang terjadi itu telah membawa rupa-rupa hal, yang sebenarnya ada di luar pergaulan bangsa Bumiputera. Selain itu perubahan juga timbul karena adanya bermacam-macam aturan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal kehidupan perekonomian orang Bumiputera, hidup bergaul dan hidup sebagai rakyat jajahan pemerintahan, sehingga reaksi-reaksi terhadap perubahan tersebut akan mengubah cara-cara hidup mereka yang lama untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang baru (Suryo, 1995/1996: 21).

Namun perlu disadari dalam melihat perubahan sosial budaya, faktor tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi. Perubahan pada salah satu unsur akan berpengaruh terhadap unsur yang lain sehingga akan mempengaruhi seluruh sistem yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi selain terdapat faktor-faktor pendukung perubahan, juga terjadi proses perlawanan terhadap perubahan tersebut. Resistensi terhadap perubahan

itu biasanya menyangkut hal-hal seperti kebiasaan yang terancam, adanya kemungkinan kekacauan, tradisionalisme, kepentingan pribadi, dan upaya untuk mempertahankan ideologi (Suryo, 1995/1996: 21-22).

Dalam surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan J.H. Abendanon kepada Gubernur Jenderal Rooseboom pun disebutkan walaupun pada sekolah-sekolah negeri Bumiputera terbuka juga bagi gadis-gadis, kesempatan ini hanya terdapat di beberapa bagian Hindia Belanda, dan hanya dalam jumlah sangat terbatas. Sebab-sebabnya ialah sebagai akibat dari pendapat umum yang tersebar luas di kalangan Bumiputera, bahwa pendidikan demikian itu tidak perlu bagi anak-anak gadis, dan adanya keberatan bahwa gadis-gadis Bumiputera yang sudah berumur 10-12 tahun dibiarkan bergaul dengan anak-anak lelaki. Peserta sekolah-sekolah Eropa yang terdiri dari puteri kepala-kepala bumiputera sangat kecil, terutama disebabkan karena terlalu tingginya uang sekolah yang dipungut dari murid-murid tersebut, dan kesulitan dalam memiliki persyaratan pendidikan sebelumnya supaya dapat diterima di sekolah-sekolah tersebut.

Keadaan wanita Indonesia pada abad XIX sampai awal abad XX masih ada dalam konservatisme dan sangat terikat oleh adat. Pengajaran di sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan hanya mendapat pendidikan di rumah atau di lingkungan keluarga dan pendidikan yang diperolehnya tidak lebih dari persiapan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Memasak, menjahit, dan membuat merupakan sebagian besar kegiatan anak-anak perempuan. Ikatan adat sangat kuat yang tidak memungkinkan mereka lepas dari kungkungan adat dan keluarga, dan dibandingkan dengan anak laki-laki, mereka jauh ketinggalan (Suhartono, 1994: 27).

Keberatan-keberatan terhadap pendidikan bagi gadis-gadis bermunculan salah satunya adalah adanya alasan yang sangat umum yang mana adat menaruh keberatan terhadap pendidikan lebih lanjut bagi gadis-gadis mereka yang telah mencapai umur 10-12 tahun pergi sendiri tanpa pengawasan. Dari umur itu sampai waktu mereka dikawinkan, mereka harus dipingit. Banyak nasehat memberi kesan seolah-olah mencari-cari keberatan, sedangkan sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cara-cara apa keberatan itu dapat diatasi (Wall, 1977: 10-12).

Dalam masyarakat tradisional proses pendidikan berpangkal pada prinsip bahwa fungsi pendidikan ialah pelestarian tradisi serta kesinambungannya dari generasi ke generasi. Permulaan kelakuan anak didik sesuai dengan adat-istiadat, yang mengutamakan otoritas orang tua di satu pihak, dan di pihak lain menurut dan mengikuti secara patuh kata orang tua yang bersifat mutlak (Kartodirdjo, 1993: 100). Namun dengan semakin dalamnya penetrasi kekuasaan lain masuk ke masyarakat Hindia Belanda, maka semakin meluas pula proses modernisasi, salah satunya terwujud sebagai perkembangan sistem pengajaran.

2. Kemajuan dari Kepanduan

Pasoekan Poeteri J.P.O. Sebagai salah satu media alternatif yang digunakan oleh Mangkunegara VII dalam menyebarkan pendidikan di lingkungan Mangkunegaran

merupakan bentuk modernisasi yang pada masa itu juga merupakan pembuka sekat budaya yang kurang berpihak kepada wanita.

Pada awalnya Padoekan Poeteri J.P.O. tidak saja mendapat tentangan dari kelompok yang tidak setuju atas dibentuknya pandu perempuan karena menganggap anak-anak perempuan tidak pantas untuk melakukan kegiatan seperti apa yang dilakukan anak-anak lelaki. Namun dari keluarga pun masih banyak yang tidak suka apabila anak-anaknya mendapat pendidikan, yang pada masa itu sering disebut sebagai “pendidikan jaman sekarang”, hal ini disebabkan antara lain kurang pahamnya orang tua dengan pentingnya pendidikan. Pengurus Besar J.P.O. selalu menekankan dengan pendidikan kepanduan, maka akan dapat menanggulangi adanya pertentangan batin anak-anak yang sudah memasuki jaman baru, zaman yang berbeda dengan orang tuanya (*Kepandoean*, No. 2, Februari 1936).

Padoekan Poeteri J.P.O. sebagai wadah kaum wanita dalam organisasi kepanduan J.P.O. tidak hanya mengekor pada pandu putra tetapi juga mampu berdiri sendiri. Secara struktural kepengurusan Padoekan Poeteri J.P.O. ada di tingkatan *Algemeene Technisch Commissie (ATC)* bagian putri, hal inilah yang membuat Padoekan Poeteri J.P.O. “mandiri” sebagai kelompok atau bagian dari organisasi yang utuh, mempunyai kebebasan, lepas dari campur tangan secara langsung kepengurusan kelompok laki-laki dan setiap anggota memiliki hak yang sama, tetapi secara umum tetap dalam koridor kebijakan pengurus besar dan juga tidak dapat lepas dari adat budaya Jawa.

Modernisasi dalam tubuh Padoekan Poeteri J.P.O. meliputi berbagai hal, seperti dalam struktur kepengurusan, pengajaran dan juga ketrampilan yang diberikan. Kepengurusan yang memiliki wewenang tertinggi Padoekan Poetri ada di tingkatan A.T.C. yang dipegang oleh *Adjunct A.T.C.*, yang membawahi *groepleidster* dan *padvinderstersgroep* yang berada di tingkatan pengurus cabang. Pengajaran bagi Padoekan Poetri J.P.O. sudah dibeda-bedakan sesuai dengan tingkatan yang telah ditentukan, hal ini dilakukan agar setiap anggota mengetahui dan memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dalam bidang ketrampilan, selain dididik untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan berbudi luhur serta berguna bagi keluarga dan masyarakat, Padoekan Poeteri J.P.O. diberi tambahan keterampilan seperti dalam bidang kesenian. Keterampilan kesenian tersebut berupa seni gamelan, seni tari, seni drama, seni suara, dan juga kesenian dari Barat seperti seni musik modern dan seni drama modern.

Dalam majalah yang diterbitkan pengurus besar J.P.O., *Kepandoean*, pandu-pandu putri juga mendapat kesempatan yang sama dengan pandu laki-laki baik untuk menulis artikel maupun rubrik-rubrik yang terdapat di dalamnya. Dalam rubrik “Roeangan Padvindster” berbagai pelajaran yang berhubungan dengan kewanitaan bisa dijadikan acuan dalam kegiatan sehari-hari, seperti ketrampilan mengolah bunga dan tanaman, tips memasak, cara mencuci yang benar, merawat benda-benda perhiasan, kesehatan rumah tangga, kecantikan, dan lain sebagainya.

Langkah-langkah maju juga telah dilaksanakan oleh kepanduan puteri, meskipun meniru pendidikan model Barat, pendidikan tersebut mempunyai keunikan tersendiri, yaitu

perpaduan antara pendidikan Barat yang rasional dengan pendidikan Jawa yang moralis. Tentang pendidikan kemandirian dan tolong menolong sesama, bagi Pasoekan Poeteri yang terpenting adalah bisa menolong di rumah, supaya anak-anak putri kelak setelah dewasa dapat memegang kendali rumah tangganya. Untuk kegiatan olah raga yang diberikan pada Pasoekan Poeteri tidak begitu banyak dan dipilih yang hanya sesuai untuk anak perempuan saja. Begitu juga dengan belajar hidup di tanah lapang (berkemah), berlainan sedikit dengan anak laki-laki. Batasan waktu untuk beraktivitas bagi anak perempuan hanya sampai waktu siang dan jarak terjauh sebagai tempat berlatih dan berkegiatan hanya sampai Manahan.

Untuk kegiatan yang dilakukan selama dua hari dan menginap, pandu putri tidak diperbolehkan mengikuti sejak awal. Namun pada hari terakhir saja anak-anak perempuan tersebut diperbolehkan mengikuti kegiatan, seperti dalam perayaan di Selogiri tahun 1936. Hal ini dilakukan pengurus J.P.O. karena dirasa kurang pantas anak-anak perempuan pergi meninggalkan rumah sampai bermalam tanpa pengawasan orang tuanya (*Kepandoean*, No. 6, Juni 1936).

Dalam berbusana, Pasoekan Poeteri jelas terlihat mulai merubah gaya busana yang baku pada masa itu, seperti pada waktu mengikuti kegiatan kepanduan, anak-anak gadis diperbolehkan untuk memakai rok yang pada waktu itu belum lazim digunakan. Dalam sebuah biografi Ibu Tien Soeharto disebutkan bahwa, “Selama bersekolah ia selalu memakai kebaya, bukan memakai rok. Hanya pada kegiatan kepanduan J.P.O. (Javaanche Padvinder Organisatie) ia diizinkan orang tuanya memakai rok, pakaian seragam J.P.O.” *ensiklopedi/siti-hartinah-soeharto/index.shtml*. Seragam J.P.O. yang sering disebut “Surya Wirawan” ini terdiri dari rok setinggi lutut, blus kuning, topi yang terbuat dari anyaman bambu, setangan leher (kain segitiga yang diikat di leher) dan ada yang memakai sepatu maupun tidak bersepatu (Yosowidagdo, 1937: 52).

Konsekuensi logis dari pembaharuan di Mangkunegaran membawa dampak sampai ke rakyat Mangkunegaran itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang diajarkan dalam kepanduan mampu membawa perubahan yang cukup signifikan bagi anggotanya. Mobilisasi sosial terjadi, antara lain mulai masuknya golongan-golongan masyarakat biasa ke dalam lingkungan Pura Mangkunegaran, baik sebagai pegawai pemerintahan ataupun sebagai pasukan kerajaan.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah gaya hidup raja terbawa keluar dari kraton, hal ini terjadi ketika lapisan masyarakat tertentu mengikuti pola gaya hidup raja dan keluarganya. Interaksi kraton dengan dunia di luar kraton mengakibatkan terbukanya budaya-budaya luar yang masuk, selain itu juga masuknya tradisi kecil yang banyak meminjam unsur-unsur peradaban Barat, seperti pakaian, menu makanan, bentuk rekreasi, penyelenggaraan pesta, pendidikan, organisasi sosial dan lain sebagainya. Etika Jawa masih dapat dipertahankan yang diberikan secara lisan, termasuk pendidikan moral untuk anak-anak putri (Soeratman, 1989: 182). Bagi pandu perempuan pun selalu tertanam maksud-maksud kepanduan setelah nantinya menjadi seorang ibu yaitu tetap menjadi *leidster* dari masing-masing keluarganya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem kolonial dengan segala macam bentuk politiknya, secara tidak langsung membawa dampak luas bagi proses modernisasi yang terwujud sebagai perkembangan sistem pengajaran Barat, industrialisasi, dan komersialisasi pertanian dan perkebunan, perluasan infra-struktur, perubahan birokrasi dan lain sebagainya. Dilihat dari segi wawasan modernisasi, menjadi jelas bahwa periode akhir abad XIX sampai dengan awal abad XX merupakan periode adaptasi terhadap sistem modern.

Pada tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an muncul perubahan salah satunya ialah ketika wanita juga diharapkan mulai berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kraton, seperti di Mangkunegaran, ditemukan adanya tanda-tanda yang kuat bahwa cukup ada ruang bergerak bagi kaum wanita.

Mangkunegara VII sebagai Raja Jawa yang progresif mulai membuka lebar-lebar celah kebudayaan yang ia rasakan sangat tidak berpihak kepada rakyatnya, khususnya kaum wanita. *Javaansche Padvinders Organisatie* (J.P.O.), sebuah organisasi kepanduan yang ia prakarsai adalah salah satu contoh sikap progresif dan modernnya.

Dalam wadah J.P.O. tersebut, peranan wanita mulai digali. Berbagai aktivitas yang pada masa itu dianggap tidak pantas dilakukan oleh wanita, mulai diperkenalkan. Kelompok wanita yang sering disebut Pasoekan Poeteri J.P.O. merupakan wadah aktivitas wanita yang mampu meningkatkan emansipasi dan sekaligus memberi peranan yang sejajar dengan kaum pria.

J.P.O. sebagai induk organisasi dari Pasoekan Poeteri J.P.O. menempatkan posisi wanita sejajar dengan kelompok laki-lakinya, walaupun dalam aktivitas berorganisasinya Pasoekan Poeteri J.P.O. mendapatkan porsi latihan fisik dan olahraga yang terbatas, hal ini cukuplah wajar untuk masa itu. Peranan J.P.O. dalam mempersepsikan kelompok wanita sebagai bagian atau golongan yang sejajar dengan golongan laki-laki, merupakan suatu kemajuan di Mangkunegaran yang tidak terlepas dari peran Mangkunegara VII sebagai perintis dan pelindung organisasi ini dalam memberikan “fasilitas” bagi kemajuan kelompok perempuan.

J.P.O. sebagai organisasi yang bersifat modern merupakan alat pendobrak sekat-sekat budaya Jawa yang pada saat itu memandang posisi wanita tidak lebih sebagai pelengkap laki-laki saja. Namun di satu sisi J.P.O. juga masih mempertahankan budaya Jawa yang masih relevan dengan kondisi zaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, modernisasi bukanlah merupakan hal yang tabu bagi generasi muda. Namun hal yang terpenting, sebagaimana yang dialami anak-anak pada zaman Mangkunegaran VII, modernisasi terjadi tanpa meninggalkan roh tradisi yang sudah diajarkan oleh generasi pendahulunya. Menjadi generasi modern yang tidak tercerabut dari akar budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari/Dalinem. 80 tahun. *Wawancara*. 6 April 2006 di Mangkunegaran, Surakarta.
- Citro Santono, *Babad Prangwadono (MN VII)*.
- Darwati, Cheviana. (1994). "Sejarah Perkembangan dan Peranan Organisasi Pandu Jawa di Mangkunegaran 1916-1942". *Skripsi S-I*, Fakultas Sastra Undip, Semarang.
- Faisal N., Azri. (2004). "Pemberantasan Buta Huruf di Mangkunegaran (1940-1944)". *Skripsi S-I* Fakultas Ilmu Budaya UGM..
- Frederick, William H. (1989). *Pandangan dan Gejolak : Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya, 1926-1946)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Jaarverslag J.P.O. Tahun 1934", dalam *Bundel Arsip Mangkunegaran, No. P.180*.
- Josowidagdo, R.T. (1939) "Sri Mangkunagara VII dengan Pendidikan Kanak-Kanak Rakyat", dalam *Buku Kenang-kenangan Tri Windu Mangkunagara VII*. Surakarta.
- "J.P.O. di Selogiri", dalam *Kepandoean*, No.6, (Juni 1936)
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. (1993). *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kepandoean*, No.1, (Januari 1936),
- Kepandoean*, No.2, (Februari 1936).
- Kepandoean*, No.6, (Juni 1936).
- Kepandoean*, No.7, (Juli 1936).
- Larson, George D. (1990). *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lerner, Daniel. (1978) *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- "Organisatie J.P.O. Schematisch", dalam *Pemimpin-J.P.O.*, No. 2 (Mei 1938).
- "Padvinderswetten J.P.O.", dalam *Bundel Arsip Mangkunegaran, No. P 634*.
- Pontjowolo, Hilmiyah Darmawan. (1993). "Peranan Wanita Mangkunegaran dari Masa ke Masa", *Artikel tidak diterbitkan*. Mangkunegaran.
- Pringgodigdo, A.K. (1960). *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Djakarta: Penerbit Pustaka Rakjat.
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riggs, Fred W. (1980) "Moderisasi dan Persoalan-Persoalan Politik, Beberapa Pra-syarat Pembangunan", dalam Williard A. Belling dan George O. Totten, *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali.

- “Riwajatmoe Doeloe: Mangkunagara VII Menjawab dengan Bertindak”, dalam (akses: 8 Oktober 2005).
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Singgih, Roswitha Pamoentjak. 1986). *Partini, Tulisan Kehidupan Seorang Putri Mangkunagaran*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soeratman, Darsiti. (1989), *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta, 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa.
- Suharini, Theresia Sri. (2000). “Javaansche Padvinders Organisatie: Awal Munculnya Kepanduan Indonesia, 1916-1942”. *Skripsi S-1*, Fakultas Sastra, UGM.
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi (1908-1945)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarmi. (2004). “Interior Pracimayasa di Pura Mangkunegaran Surakarta (Kajian Estetik)”. *Tesis S-2*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta,
- “Surat kepada H.B J.P.O.”, tanggal 2 Juli 1935, dalam *Bendel Arsip Mangkunagaran*, No. P.186.
- Suryo, Djoko. dkk. (1995/1996). “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Pulau Jawa Abad VIII-XX”, *Penelitian*, kerjasama Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dengan Fakultas Sastra UGM.
- Tjitrosomo, Amin Singgih. (1944). “Oesaha dan Djasa Marhoem Seri Padoeka Jang Moelia Mangkoenagara VII Terhadap Pendidikan dan Pengadjaran”. Artikel yang tidak diterbitkan, Kaboepaten Barajawijata Mangkunegaran.
- Wall, S.L. van der. (1977). *Het Onderwijsbeleid in Nederland-Indie, 1900-1940*. (terjemahan). Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Wasino. (1994) “Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunagaran: Studi tentang Strategi Pemerintahan Tradisional dalam Menanggapi Perubahan Sosial (Akhir Abad XIX-Pertengahan Abad XX)”, *Tesis S-2* Program Pasca Sarjana UGM.
- (1995/1996). “Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran (1900-1945)”, *Laporan Penelitian*, FPIPS, IKIP Semarang.
- www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/siti-hartinah-soeharto/index.shtml. (akses: 30 Agustus 2005).
- Yosowidagdo, R. Ng. (1937) *Bocah Mangkunagaran*. Batavia Centrum: BP.

